

Special Issue:

Penulis:

**PERAN LEMBAGA
FILANTROPI ISLAM DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN
SOSIAL DI INDONESIA**

Muhamad Farhan, S.IP.

Bangsa ini ditopang oleh 4 landasan yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Empat landasan ini dirumuskan oleh para pendiri Bangsa kita. Salah satu dari landasan Negara kita adalah Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar landasan Negara, tapi juga sebagai falsafah kebangsaan kita, pedoman hidup kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai dari Pancasila merupakan cerminan dari ajaran Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan menelaah secara mendalam substansi dari Pancasila yang dibandingkan dengan ajaran syariat Islam. Penulis akan membahas sekelumit saja tentang ini, karena tulisan ini tidak berfokus pada Pancasila secara mendalam. Pertama, Islam mengajarkan ketauhidan (Ketuhanan) sementara dari sila ke 1 Pancasila yakni Ketuhanan yang maha Esa. Ke dua, Islam datang membawa peradaban yang mulia diiringi oleh nilai-nilai keadilan,

kita bisa melihat sejarah wajah masa Jahiliyah dunia Arab sebelum Islam datang. Hal ini juga sinkron dengan sila ke-2 Pancasila yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Ke-3 dari Pancasila yakni Persatuan Indonesia, merupakan cerminan dari al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Sila ke-4 yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh Khidmat Kebijaksanaan Perwakilan. Sebuah konsep kepemimpinan berdasarkan kepentingan rakyat. Kita bisa berkaca pada sejarah kepemimpinan Rasulullah dan Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sila ke-5, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip keadilan sosial, Islam juga menyerukan tentang pemberantasan kemiskinan dalam surat Al Ma'un.

Hal ini Islam mengajarkan, disamping kita mengabdikan diri pada tuhan, kita juga harus peduli pada sesama. Kepedulian kita tidak hanya sebatas pada manusia saja tetapi juga seluruh alam semesta, untuk itulah Islam datang sebagai pembawa rahmatan lil 'alamin.

Penulis tidak akan berpanjang lebar membahas hubungan Pancasila dengan Syariat Islam. Fokus dalam tulisan ini ialah usaha membumikan nilai sila ke-5 melalui kegiatan Lembaga Filantropi Islam. Penulis tertarik mengangkat tema itu karena penulis menilai Pemerintah dan Negara belum mampu mewujudkan nilai sila ke-5 pada bangsa ini. Mungkin bangsa ini terlalu besar dan luas sehingga Pemerintah belum bisa menjamah secara keseluruhan dalam pemerataan kesejahteraan sosial. Apalagi di dalam tubuh pemerintah sendiri ada tikus-tikus yang menggerogoti keuangan Negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat, baik di ranah eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Fenomena ketidakadilan sosial dan ekonomi secara konkrit mewujud dalam bentuk kemiskinan, kesenjangan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketertindasan. Keadaan ini senantiasa mengiringi perjalanan sejarah manusia. Bahkan, Rasul diturunkan, disamping untuk mendakwahkan agama, juga ditujukan untuk berjuang mewujudkan kesejahteraan, membangun peradaban yang maju, dan membebaskan masyarakat dari penindasan. Sementara, di era pasca kenabian tugas itu terutama menjadi tanggungjawab negara atau pemerintahan yang berdaulat.

Dalam konteks Indonesia, masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok yakni, kelompok atas (elit), menengah, dan bawah (rakyat miskin). Di sinilah peran negara untuk menjembatani antara si kaya dan si miskin. Negara berperan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat Pancasila pada sila ke-5. Namun pada faktanya, negara belum mampu menjembatani antara si kaya dan si miskin. Hal yang terjadi adalah semakin melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Kegagalan negara dalam membangun tata sosial yang adil telah memicu berkembangnya berbagai gerakan masyarakat sipil baik dalam membuat protes maupun aksi kemanusiaan. Hilman Latief, dalam bukunya Filantropi Islam, juga mengatakan bahwa munculnya gerakan sosial yang menyantuni umat adalah akibat lemahnya peran negara. Ketika negara tidak lagi berpihak pada rakyat kecil, maka muncullah sebuah gerakan untuk melawan diskriminasi. Gerakan itu biasanya diinisiasi dari kaum menengah ke atas dan didukung oleh semua golongan. Tujuan dari gerakan itu adalah mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, gerakan tersebut bisa bermacam-macam bentuknya. Salah satu bentuknya ialah lembaga Filantropi. Lembaga filantropi merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan umat. Gerakan dari lembaga tersebut adalah sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat secara merata. Gerakan ini pada umumnya dibentuk oleh lembaga swasta, namun dalam perjalanannya pemerintah membentuk lembaga serupa guna membantu programnya yakni mengentaskan kemiskinan.